



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAHARUDDIN ALRIF**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **482161**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.680.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 709 m2/609 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, Rp. 3.020.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.560.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/220 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.377.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HIACE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINP Tahun 2017, HADIAH Rp. 37.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.592.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 285.476.986**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 90.000.000**

Sub Total **Rp. 16.024.476.986**

III. HUTANG **Rp. ----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

16.024.476.986

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.